SKRIPSI

IMPLEMENTASI DESA WISATA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAHAN MASYARAKAT DI KECAMATAN BOROBUDUR

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Nursan Safety Maghvira

19.0201.0055

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2026

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan didalamnya mengatur pemberian pelayanan pariwisata di Desa Wisata Borobudur. Salah satu pelaksanaan pelayanan minimal kepariwisataan ini juga dilaksanakan di Desa wisata Borobudur. Pelaksanaan pelayanan minimal pada Desa Wisata Borobudur bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan kepariwisataan di Indonesia, sebagai salah satu destinasti wisata di daerah Borobudur Magelang Jawa Tengah (Oktafiarni, 2022). Selain itu ketentuan pelayanan kepariwisataan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Pelayanan minimal yang selanjutnya ditetapkan bertujuan untuk memenuhi hak para wisatawan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Adapun Implementasi Desa Wisata untuk membantu masyarakat meningkatkan kesejahterahan melalui usaha untuk mengembangkan potensi-potensi daerah dengan membangun rumah inap (homestay) untuk disewakan, pembinaan potensi lokal melalui kerajinan khas daerah, kuliner dan peluang usaha lainnya (Hardiyanti, 2021).

Menurut data dari Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang terdapat 20 Desa wisata di Kecamatan Borobudur yaitu diantaranya : Desa Wisata Candirejo, Desa Wisata Bigaran, Desa Wisata Borobudur, Desa Wisata bumiharjo, Desa Wisata Giripurno, Desa Wisata Giritengah, Desa wisata Karaganyar, Desa Wisata Karangrejo, Desa Wisata Kebonsari, Desa Wisata

Kembanglimus, Desa Wisata Kenalan, Desa Wisata Majaksingi, Desa Wisata Ngadiharjo, Desa Wisata Ngargogondo, Desa Wisata Sambeng, DesaWisata Tanjungsari, Desa Wisata Tegalarum, Desa Wisata Tuksong, Desa Wisata Wringinputih, Desa Wisata Wanurejo.

Selain itu Implementasi Desa Wisata juga penting untuk kelangsungan masyarakat sekitar Desa Wisata Kecamatan Borobudur yaitu memiliki kontribusi yang mana dapat meningkatkan pendapatan dalam desa dan juga dapat memenuhi kebutuhan pokok desa. Selain itu Implementasi dari Desa Wisata dilihat dari sumber dana yang telah dikelola untuk dapat meningkatkan pendapatan, kebutuhan sehari-hari masyarakat untuk keseluruhannya (Azizah, 2021).

Salah satu bentuk tanggung jawab BUMN adalah mendorong perekonomian Indonesia sebagaimana yang di cita-citakan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu cara untuk mencapai pemerataan pembangunan pariwisata dan manfaatnya. Dengan cara melaksanakan program sinergi pengembangan pariwisata Indonesia yang dapat memberikan kesejahterahan perekonomian kepada masyarakat. Dengan begitu BUMN bersinegri dengan pemerintah Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah untuk mendorong pembentukan lembaga pengelola kawasan wisata yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi aktivitas pariwisata di Desa Wisata Borobudur. Lembaga ini dapat berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) (Suryo Baskoro & Cholsy, 2024).

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan wisata, yang meliputi perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan promosi destinasi

wisata. Kepariwisataan mencakup berbagai aspek seperti transportasi, akomodasi, layanan, dan infrastruktur yang mendukung kegiatan wisata. Tujuan utama dari kepariwisataan adalah untuk menarik wisatawan dosentik maupun internasional, untuk mengunjungi suatu tempat, serta memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan kepada para pengunjung.

Selain itu, keperiwisataan juga berperan dalam meningkatkan perekonimian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat lokal, dan pelestarian budaya serta lingkungan. Dengan demikian, kepariwisataan tidak hanya bermanfaat bagi wisatawan, tetapi juga bagi komunitas lokal dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu juga kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Kepariwisataan juga adalah kegiatan yang melibatkan perjalanan atau perpindahan orang dari tempat tinggalnya menuju destinasi lain untuk tujuan rekreasi, hiburan, budaya, bisnis, atau pendidikan. Kepariwisataan mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh wisatawan selama perjalanan dan tinggal di destinasi tersebut, serta semua layanan dan fasilitas yang mendukung aktivitas tersebut, seperti transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, atraksi wisata dan pemandu wisata. Berikut adalah beberapa aspek penting pariwisata :

1. Wisatawan: Orang yang melakukan perjalanan ke destinasi wisata. Wisatawan dapat dibedakan menjadi wisatawan domestik (yang melakukan

perjalanan di dalam negeri) dan wisatawan internasional (yang melakukan perjalanan di luar negeri).

2. Destinasi Wisata: Tempat atau lokasi yang menjadi tujuan perjalanan wisatawan. Destinasi ini bias berupa kota, desa, situs alam, situs sejarah, tempat rekreasi, atau atraksi budaya.
3. Akomodasi: Fasilitas penginapan yang digunakan oleh wisatawan selama berada di destinasi wisata seperti, hotel, resort, villa, guest house, atau homestay.
4. Atraksi Wisata: Segala sesuatu yang menarik wisatawan untuk berkunjung, seperti pemandangan alam, situs sejarah, kebudayaan, festival, taman hiburan, dan kegiatan olahraga.
5. Transportasi: Sarana prasarana yang digunakan untuk memindahkan wisatawan dari tempat asal ke destinasi wisata dan di dalam destinasi wisata tersebut, seperti pesawat, kereta api, bus, kapal, dan kendaraan pribadi.
6. Layanan Pariwisata: Berbagai layanan yang mendukung kegiatan pariwisata, termasuk pemandu wisata, operator tur, agen perjalanan, restoran, toko oleh-oleh, dan pusat informasi wisata.
7. Industri Pariwisata: Sektor ekonomi yang mencakup semua bisnis dan organisasi yang menyediakan produk dan layanan terkait pariwisata, seperti hotel, restoran, maskapai penerbangan, perusahaan penyewaan mobil, dan perusahaan penyelenggara tur.

Kepariwisataan memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian, sosial, budaya, dan lingkungan suatu daerah. Sektor ini dapat menciptakan

lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, melestarikan budaya lokal, dan meningkatkan kualitas infrastruktur. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, pariwisata juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, kemacetan, dan perubahan budaya lokal. Oleh karena itu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan sangat penting untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negative dari aktivitas pariwisata.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Dinas Pariwisata di Kabupaten Magelang, penulis mengelompokan Desa Wisata menjadi 3 bagian per-komponen diantaranya Desa Wisata Paling maju, berkembang dan rintisan. Berikut merupkan table Data Desa Wisata di Bororbudur per-komponen:

Tabel 1. Data Klasifikasi Desa Wisata di Kecamatan Borobudur

No.	DESA	KECAMATAN	NOMOR SK BUPATI	TANGGAL SK BUPATI	klasifikasi	sk klasifikasi
1	Desa Wisata Candirejo	Borobudur	556/1258/19/1999 (Perbub No. 6 Tahun 2008, tgl 31 Jan 2008) 180.182/229/KEP/19/2021	15 Juli 2021	Maju	SK Klasifikasi 2021 Konsultan 2017
2	Desa Wisata Bigaran	Borobudur	180.182/54/KEP/19/2020	10 Februari 2020	Rintisan	SK Klasifikasi 2022
3	Desa Wisata Borobudur	B orobudur	180.182/163/KEP/19/2025	15 April 2025	Maju	SK Klasifikasi 2025 Konsultan 2022
4	Desa Wisata Bumiharjo	Borobudur	180.182/40/KEP/19/2020	10 Februari 2020	Berkembang	SK Klasifikasi 2022
5	Desa Wisata Giripurno	Borobudur	180.182/63/KEP/19/2021	17 Februari 2021	Rintisan	SK Klasifikasi 2021
6	Desa Wisata Giritengah	Borobudur	180.182/56/KEP/19/2020	10 Februari 2020	Rintisan	SK Klasifikasi 2022

7	Desa Wisata Karanganyar	Borobudur	180.182/337/KEP/19/2020	12 Oktober 2020	Berkembang	SK Klasifikasi 2021
8	Desa Wisata Karangrejo	Borobudur	180.182/175/KEP/19/2018 180.182/231/KEP/19/2021	12/03/2018 15 Juli 2021	Maju	SK Klasifikasi 2021
9	Desa Wisata Kebonsari	Borobudur	180.182/43/KEP/19/2021	17 Februari 2021	Rintisan	SK Klasifikasi 2021
10	Desa Wisata Kembanglimus	Borobudur	180.182/338/KEP/19/2020	12 Oktober 2020	Rintisan	SK Klasifikasi 2021
11	Desa Wisata Kenalan	Borobudur	180.182/339/KEP/19/2020	12 Oktober 2020	Rintisan	SK Klasifikasi 2021
12	Desa Wisata Majaksingi	Borobudur	180.182/57/KEP/19/2020	10 Februari 2020	Berkembang	SK Klasifikasi 2023
13	Desa Wisata Ngadiharjo	Borobudur	180.182/55/KEP/19/2020	10 Februari 2020	Rintisan	SK Klasifikasi 2021
14	Desa Wisata Ngargogondo	Borobudur	180.182/42/KEP/19/2021	17 Februari 2021	Berkembang	SK Klasifikasi 2023
15	Desa Wisata Sambeng	Borobudur	180.182/53/KEP/19/2020	10 Februari 2020	Rintisan	SK Klasifikasi 2021
16	Desa Wisata Tanjungsari	Borobudur	180.182/340/KEP/19/2020	12 Oktober 2020	Rintisan	SK Klasifikasi 2021
17	Desa Wisata Tegalarum	Borobudur	180.182/41/KEP/19/2024	17 Februari 2024	berkembang	SK Klasifikasi 2024
18	Desa Wisata Tuksongo	Borobudur	180.182/205/KEP/19/2023	29 September 2023	Berkembang	SK Klasifikasi 2023
19	Desa Wisata Wringinputih	Borobudur	180.182/341/KEP/19/2020	12 Oktober 2020	Berkembang	SK Klasifikasi 2022 Konsultan 2017
20	Desa Wisata Wanurejo	Borobudur	180.182/164/KEP/19/2019	15 April 2019	Maju	SK Klasifikasi 2021

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang

Dalam upaya peningkatan pelayanan minimal pada Desa Wisata Borobudur juga dilakukan penyusunan regulasi. Lembaga pengelola kawasan wisata perlu menyusun regulasi yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Regulasi ini akan

mengatur standar pelayanan, perizinan, pemeliharaan, keamanan, dan perlindungan lingkungan di kawasan Desa Wisata Borobudur. Selain adanya penyediaan fasilitas untuk pemenuhan standar minimal pelayanan pada Desa Wisata Borobudur (Hidayat, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan mewajibkan penyediaan fasilitas dasar yang memadai dikawasan wisata, termasuk aksesibilitas, sanitasi, parker, dan sarana pendukung lainnya. Lembaga pengelola harus memastikan bahwa fasilitas-fasilitas ini tersedia dan terjaga dengan baik untuk meningkatkan pengalaman wisatawan.

Peningkatan pelayanan kepariwisataan juga memerlukan adanya pelatihan tenaga kerja. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan juga meneknkan pentingnya pelatihan tenaga kerja di sektor pariwisata. Lembaga pengelola kawasan Desa Wisata Borobudur dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sektor pariwisata. Selain itu juga perlu dilaksanakan promosi pariwisata. Lembaga pengelola kawasan wisata perlu mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk menarik wisatawan ke Desa Wisata Borobudur, baik dalam maupun luar daerah Magelang (Simanjuntak & Sariffuddin, 2017).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang meningkatkan kesejahterahan Masyarakat di Kecamatan Borobudur ?
2. Apa Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Desa Wisata dalam meningkatkan kesejahterahan Masyarakat di Kecamatan Borobudur dan solusinya ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas terkait dengan langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan-batasan dalam penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini :

1. a. Untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan telah dijalankan di Kecamatan Borobudur.

   b. Untuk mengidentifikasi program dan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata berdasarkan Undang-Undang tersebut.

   c. Untuk menganalisis dampak dari Implementasi Undang-Undang terhadap Kesejahterahan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.

   d. Untuk memberikan rekomendasi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan kepariwisataan demi kesejahterahan masyarakat di daerah wisata.

2. a. Mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Borobudur terhadap isi dan tujuan UU No. 10 tahun 2009.

   b. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan kepariwisataan di tingkat masyarakat.

   c. Mengkaji peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi undang-undang tersebut.

   d. Memberikan rekomendasi untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan UU No. 10 kecamatan Borobudur.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini :

1. Meningkatkan Pemahaman: Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan diImplementasikan pada Pelayanan Kepariwisataan di Desa Wisata Borobudur. Hal ini akan membantu para peneliti, pemerintah, dan stekholder terkait dalam memahami peraturan yang berlaku dan menjalankan kegiatan pariwisata sesuai dengan pelayanan yang ditetaapkan.
2. Evaluasi Kebijakan: Penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi efektifitas kebijakan yang ada. Dengan menganalisis Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dapat diidentifikasi keberhasila dan kegagalan

kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi Imlementasinya. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki kebijakan yang ada dan mengoptimalkan hasil yang diharapkan.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan : dengan mempelajari Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dapat diidentifikasi area dimana kualitas pelayanan pariwisata di Desa Wisata Borobudur perlu ditingkatakan. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan strategi dan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, memberikan pelayanan yang lebih baik.
4. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan : Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pariwisata berkelanjuatan di Desa Wisata Borobudur. Dengan menganalisis Implementasi Undang-Undang dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dapat dihasilkan rekomendasi untuk mengatasi masalah dan mendorong praktik-praktik berkelanjutan dalam pengelolaan pariwisata.
5. Penelitian Lanjutan : Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan menjadi dasar untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan pariwisata, baik di Desa Wisata Borobudur maupun di Destinasi wisata lainnya. Hal ini dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang upaya meningkatakan pelayanan dan pengelolaan pariwisata.

Dengan manfaat- manfaat tersebut, penelitian mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang mengatur pelayanan Kepariwisataan di kawasan Wisata Desa Wisata Borobudur memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam industri pariwisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bora (2019) melakukan penelitian ini dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengembangan Wisata Bunga Dalam Upaya Meningkatan Kesejahterahan Masyarakat" adapun fokus pembahasan mengenai kepariwisataan yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan wisata bunga dalam upaya meningkatkan kesejahterahan masyarakat dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengembangan wisata bunga dalam upaya meningkatkan kesejahterahan masyarakat. Jadi adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa implementasi kebijakan Pengembangan Wisata Bunga di Desa Sidomulyo, Kota Batu sudah cukup berjalan dengan baik karena adanya saling keterbukaan antara Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Sidomulyo, tercukupinya jumlah tenaga kerja usia produktif yang ditunjang dengan disposisi atau sikap para implementor yang sudah seutuhnya mendukung Pengembangan Wisata Bunga di Desa Sidomulyo, serta struktur birokasi yang sudah ccukup berjalan dengan baik antara aparatur desa yang turut andil dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh masyarakat. Namun masih ditemui kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata dan keterbatasan modal.

Selanjutnya Dhenas Rifqi Wirambara Baehaq (2022) melakukan penelitian ini dengan judul pembahasan "Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa

Wisata Di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung" adapun fokus pembahasan mengenai kepariwisataan yang bertujuan untuk mengetahui factor pendukung dan menghambat implementasi kebijakan pembangunan desa wisata di Kabupaten Belitung Timur dan upaya yang dilakukan dalam membangun pariwisata di desa wisata Kabupaten Belitung Timur. Jadi adapun hasil dari penelitian ini adalah terhadap implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Wisata Di Kabupaten Belitung Timur berjalan cukup baik. Namun, ada kekurangan dimana akses menuju jalan menuju desa wisata masih rusak dan kurangnya saluran air. Saran kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yaitu dengan berkoordinasi dengan dinas lain agar dapat membantu pembangunan Desa Wisata Di Belitung Timur.

Selanjutnya Aini et al (2020) melakukan penelitian ini dengan judul "Implementasi Program Desa Wisata Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik" adapun fokus pembahasan ini untuk mengetahui implementasi program desa wisata dalam rangka meningkatka perekonomian masyarakat di Desa Hendrosari, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Jadi adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan program Desa Wisata sudah terlaksana dengan baik dan keadaan ekonomi masyarakat yang menjadi sarana sudah mengalami peningkatan hanya saja terdapat penghambat yaitu kurangnya beberapa fasilitas pendukung yang belum terpenuhi.

Selanjutnya Septivia et al (2023) melakukan penelitian ini dengan judul pembahasan "Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Berbasis

Partisipasi Masyarakat" adapun fokus pembahasan ini untuk menganalisis implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbais partisipasi masyarakat di Objek Wisata Jamun Spot Sunset Desa Poncokusumo Kabupaten Malang serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut. Jadi adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukan bahwa berdasarkan indicator implementasi kebijakan menurut Edward III dan partisipasi masyarakat menurut Marschall (dalam Darin 2022), implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat di Desa Wisata Poncokusumo sudah berjalan dengan baik, adapun faktor pendukung meliputi faktor internal yaitu kerja sama antar pemangku kebijakan dan kerja keras anggota pokdarwis serta faktor eksternal yaitu potensi bentang alam dan budaya. Sedangkan faktor penghambat melipui faktor internal yaitu kemampuan public speaking SDM pengelola serta hambatan secara eksternal yaitu sarana prasarana berupa alses jalan dan sumber air serta kurangnya dukungan dana.

Selanjutnya CAHYANINGRUM (2021) melakukan penelitian ini dengan judul pembahasan "Implementasi Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Kalongan Di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah " adapun fokus pembahasan mengenai kepariwisataan yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Dinas Pariwisata dalam pengembangan desa wisata khususnya desa wisata kalongan, apa saja faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam mengatasi faktor penghambat dan pengembangan desa wisata. jadi adapun hasil dari penelitian adalah

pelaksanaan pengembangan desa wisata Kalongan telah dilaksanakan seluruh pihak terkait namun hasilnya masih belum optimal karena adanya beberapa permasalahan seperti sumber daya manusia, sarana prasarana, keterlibatan investor sehingga perlunya kegiatan sosialisasi dan promosi melalui event budaya untuk dapat memajukan memajukan pariwisata di Desa kalongan.

B. Kerangka Teori

Dalam Penelitian ini penulis juga menggunakan pedoman atau landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk membantu menganalis berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian.

Teori Implementasi menurut George Edward III yaitu mengembangkan teori implementasi kebijakan public yang dikenal dengan model implementasi kebijakan George Edward III. Menurut George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat variable utama yaitu:

1. Komunikasi (Communication): Kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas dan tepat kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Informasi yang disampaikan harus akurat dan dipahami oleh semua pelaksana kebijakan. Kekurangan dalam komunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kegagalan implementasi.
2. Sumber Daya (Resources): Implementasi kebijakan memerlukan sumber daya yang cukup, baik itu sumber daya manusia, dana, waktu, maupun sarana dan prasarana. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan sulit untuk dimplementasikan dengan baik.

3. Sikap (Disposition/Atittudes): Sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan Implementasi. Jika para pelaksana memiliki sikap positif dan komitmen tinggi terhadap kebijakan tersebut, mereka akan lebih termotivasi untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Sebaliknya, sikap negative dapat menghambat proses Implementasi.
4. Struktur Birokrasi (Bureaaucratic Structure): Struktur organisasi dan mekanisme birokrasi yang ada harus mendukung Implementasi kebijakan. Hal ini mencakup prosedur operasional standar, koordinasi antar unit, serta tingkat fleksibilitas dan respon yang dimiliki oleh birokrasi. Struktur birokrasi yang rumit dan tidak efisien dapat menghambat Implementasi kebijakan.

Model ini menekankan bahwa keempat variable tersebut harus diperhatikan dan dikelola dengan baik agar Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Teori Implementasi mencakup berbagai pendekatan dan model yang digunakan untuk menerapkan kebijakan dan strategi dalam sektor pariwisata. Implementasi kepariwisataan melibatkan penerapan kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata yang mempengaruhi destinasi wisata, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal. Implementasi kebijakan kepariwisataan yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan intregatif, menggabungkan berbagai teori dan model yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Model ini menekankan bahwa keempat variable tersebut harus diperhatikan dan dikelola dengan baik agar Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Teori Implementasi mencakup berbagai pendekatan dan model yang digunakan untuk menerapkan kebijakan dan strategi dalam sektor pariwisata. Implementasi kepariwisataan melibatkan penerapan kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata yang mempengaruhi destinasi wisata, pelaku pariwisata, dan masyarakat lokal. Implementasi kebijakan kepariwisataan yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dan intregatif, menggabungkan berbagai teori dan model yang sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan pemangku kepentingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Empiris yaitu merupakan suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari baik perilaku verbal yang yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung maupun dari perilaku manusia. Penelitian yuridis empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupapeninggalan arsip maupun fisik.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah yuridis empiris dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian Pendekatan sosiologis (Soerjono Soekanto). Pendekatan sosiologis merupakan penelitian yang memerlukan metode ilmiah. Tujuannya untuk mempelajari atau mengkaji obyek penelitiannya, yakni masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2013) ada dua jenis metode penelitian sosiologi yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif maih dibagi menjadi tiga yaitu mode historis, komparatif, dan studi kasus.

A. Metode Kualitatif: Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metode kualitatif dalam penelitian sosiologi, mengutamakan bahan yang sulit diukur dengan angka atau ukuran lain yang bersifat eskak, meski bahan tersebut sebenarnya bisa didapat secara nyata dimasyarakat.
B. Metode Historis adalah metode yang menggunakan analisis atas peristiwa dimasa lampau untuk merumuskan berbagai prinsip umum.
C. Metode Sosiologis. Sebagai ilmu pengetahuan penelitian sosiologi merupakan metode ilmiah. Tujuannya untuk mempelajari atau mengkaji obyek penelitiannya, yaitu masyarakat. Para sosiolog atau ahli sosiologi ada yang menggunakan satu metode ilmiah dalam penelitiannya. Namun tak jarang juga para sosiolog menggunakan satu metode. Metode penelitian diatikan sebagai upaya untuk mencari tahu sebuah cara atau mendapat pengetahuan ilmiah.
D. Metode Antropologis. Antropologis adalah metode penelitian yang mengangkut unsur-unsur kebudayaan dari konteks masyarakat yang hidup dan dibandingkan dengan sebanyak mungkin unsur-unsur dan aspek suatu kebudayaan. Alat penelitian yang digunakan oleh para antropolog dalam meneliti kebudayaan adalah etnografi.

C. Objek Penalitian

Objek Penelitian pada penelitian ini adalah Implementasi Desa Wisata Dalam Meningkatkan Kesejahterahan Masyarakat Di Kecamatan Borobudur.

D. Sumber Data

Sumber Data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara untuk memperoleh data langsung berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data sekunder diperoleh dari:

1. Bahan hukum premier : Undang-Undang Dasar Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
2. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel, ilmiah, buku, jurnal, dan webside internet yang relevan terkait topikyang dibahas oleh peneliti.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, buku pedoman penulis skripsi, berita hukum dan berita akses dari internet.

E. Teknik Pengambilan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis dengan melakukan wawancara. Sampel data yang digunakan yaitu:

Tabel 2. Data Klasifikasi Desa Wisata di Kecamatan Borobudur

No	Desa Wisata Maju	Desa Wisata Berkembang	Desa wisata Rintisan
1	Desa Wisata Candirejo	Desa Wisata Bumiharjo	Desa wisata Bigaran
2	Desa Wisata Borobudur	Desa Wisata Karanganyar	Desa Wisata Giripurno
3	Desa Wisata Karangrejo	Desa Wisata Majaksingi	Desa Wisata Giritengah
4	Desa Wisata Wanurejo	Desa Wisata Ngargogondo	Desa Wisata Kebunsari
5		Desa Wisata Tuksongo	Desa Wisata Kembanglimus
6		Desa Wisata Ringinputih	Desa Wisata Kenalan
7		Desa Wisata Tegalarum	Desa Wisata Ngadiharjo
8			Desa Wisata Sambeng
9			Desa Wisata Tanjungsari

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil sampel yaitu 2 Desa Wisata maju yang terdiri dari Desa Wisata Candirejo dan Desa Wisata Borobudur, Desa Wisata maju yaitu desa yang memiliki peran aktif terhadap perekonomian warga dan sekitarnya seperti infrastruktur lengkap dan terawat, penjual produk oleh-oleh khas Borobudur, daya tarik wisata sudah kuat dan beragam, didukung oleh sarana prasarana yang lengkap akses mudah, serta pelayanan wisata yang professional. Sampel Desa Wisata berkembang yaitu ada desa yang masih berkembang antara lain, Desa Wisata Bumiharjo, dan Tuksongo pengertian dari Desa Wisata Berkembang yaitu sebuah konsep yang menacup pada desa-desa di Indonesia yang sedang mengalami perkembangan dalam bidang pariwisata seperti daya tarik wisata yang jelas dan mulai dikenal, baik wisata alam, budaya, maupun buatan, fasilitas

pendukung sudah tersedia meskipun belum lengkap, aksesibilitasnya relatif lebih baik. Sampel desa wisata rintisan yaitu ada 2 desa yang masih merintis yakni, Desa Wisata Bigaran dan Desa Wisata Giripurn. Pengertian dari Desa wisata rintisan yaitu mengacu pada desa-desa di Indonesia yang sedang tahap awal pengembangan sebagai destinasi pariwisata. Alasan desa itu masuk kategori rintisan karena daya tarik wisata masih terbatas, sarana dan prasarana pendukung seperti akses jalan, fasilitas umum, serta wisata yang belum memadai.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif dengan meredukasi data agar sesuai dengan topik yang diteliti dan menyajikan secara deskriptif, kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan secara induktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi desa wisata di Kecamatan Borobudur telah memperlihatkan perkembangan yang cukup positif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun dampaknya belum dirasakan secara merata di setiap desa. Indikasi kemajuan tersebut tercermin dari meningkatnya kegiatan ekonomi warga, bertambahnya kesempatan kerja di bidang pariwisata, tumbuhnya usaha mikro dan ekonomi kreatif berbasis lokal, serta naiknya pendapatan masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan desa wisata. Akan tetapi, sejumlah desa masih mengalami perkembangan yang relatif tertinggal atau belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia, lemahnya kemampuan manajerial kelembagaan desa wisata, minimnya akses terhadap permodalan, serta belum optimalnya upaya promosi dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, tingkat keterlibatan masyarakat yang belum merata turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan desa wisata di beberapa wilayah. Berdasarkan kondisi tersebut, implementasi desa wisata di Kecamatan Borobudur dapat diklasifikasikan berada pada tahap berkembang, di mana sebagian desa telah menunjukkan kemajuan yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara desa lainnya masih membutuhkan

pendampingan serta penguatan kapasitas. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengembangan yang lebih inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan guna mengurangi kesenjangan tingkat kemajuan antar desa dan memastikan manfaat desa wisata dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dalam pengembangan desa wisata di Kecamatan Borobudur masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang berdampak pada belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kendala utama yang muncul antara lain terbatasnya pemahaman serta kemampuan sumber daya manusia terhadap isi dan tujuan undang-undang, kurang efektifnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta belum maksimalnya fungsi kelembagaan desa wisata dalam mengelola potensi pariwisata secara profesional dan berkelanjutan. Di samping itu, keterbatasan alokasi anggaran dan akses terhadap permodalan, minimnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata, serta belum optimalnya strategi promosi dan pemanfaatan teknologi digital turut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip kepariwisataan sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Tingkat partisipasi masyarakat yang belum merata juga menjadi tantangan tersendiri, sehingga manfaat ekonomi dari desa wisata belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kualitas

sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan, penguatan kelembagaan desa wisata, serta peningkatan sinergi dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku pariwisata. Selain itu, dukungan kebijakan berupa kemudahan akses permodalan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta penguatan promosi berbasis digital perlu terus dioptimalkan. Dengan pelaksanaan solusi tersebut secara terpadu dan konsisten, implementasi Undang-Undang Kepariwisataan di Kecamatan Borobudur diharapkan dapat berjalan lebih efektif dalam mendukung pengembangan desa wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Saran

1. Desa wisata yang telah berkembang dengan baik perlu diarahkan pada upaya menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas pengelolaan. Pemerintah desa dan pengelola desa wisata disarankan untuk terus melakukan inovasi produk wisata agar tetap menarik dan mampu bersaing, baik di tingkat regional maupun nasional. Diversifikasi atraksi wisata, penguatan paket wisata berbasis budaya dan alam, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wisatawan menjadi hal yang penting untuk dipertahankan. Selain itu, desa wisata yang sudah maju perlu memperkuat tata kelola kelembagaan dan profesionalisme pengelola, termasuk transparansi keuangan dan pembagian manfaat yang adil bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam promosi, reservasi, dan pemasaran

juga perlu terus dioptimalkan. Di sisi lain, aspek pelestarian lingkungan dan budaya lokal harus tetap menjadi prioritas agar perkembangan pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan ekosistem desa.

2). Bagi desa wisata yang masih dalam tahap berkembang atau belum maju, fokus utama perlu diarahkan pada penguatan dasar pengembangan pariwisata. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan menjadi langkah awal yang sangat penting, khususnya dalam hal pengelolaan wisata, pelayanan, dan kewirausahaan. Selain itu, pemerintah daerah dan pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan dukungan berupa penyediaan infrastruktur pendukung pariwisata, akses permodalan bagi pelaku usaha lokal, serta pembentukan dan penguatan kelembagaan desa wisata. Promosi potensi wisata juga perlu ditingkatkan, baik melalui media digital maupun kerja sama dengan pihak lain. Yang tidak kalah penting, peningkatan partisipasi masyarakat harus terus didorong agar pengembangan desa wisata dapat berjalan secara inklusif dan memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.